

Aspek Demografi-Ekonomi SIJORI: Tersingkirnya Penduduk Riau Kepulauan dalam Pembangunan Batam dan Bintan

Riwanto Tirtosudarmo*

"Saya berpikir bahwa ketika ini sudah terbukti orang Melayu saudara kita menjadi penonton dan akan ditonton bagaikan ikan hias di dalam akuarium".

(Tun Ramli, seorang pemilik hotel di Belakang Padang -- dikutip dari Effendi, 1993).

Pengantar

SALAH satu konsekuensi dari keputusan menjadikan daerah Riau Kepulauan, terutama Batam dan Bintan, sebagai lokasi investasi industri, adalah terbukanya peluang kerja di daerah ini bagi para pencari kerja, baik dari daerah Riau Kepulauan sendiri maupun dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Masalahnya bahwa keputusan para petinggi di pusat tidak secara jelas didasari oleh pertimbangan yang mempunyai persentuhan dengan kepentingan penduduk Riau Kepulauan sendiri. Meskipun, sebagaimana secara resmi dikemukakan, dalam kerja sama SIJORI, *comparative advantage* kita adalah melimpahnya tenaga kerja yang bisa diupah rendah, dalam kenyataan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan sama sekali tidak mempertimbangkan potensi sumber daya penduduk setempat

(lokal) yang ada. Apa yang terjadi kemudian, sebagaimana dengan mudah dapat ditebak, adalah berlangsungnya proses peminggiran (marginalisasi) penduduk setempat oleh para pendatang yang memiliki kualifikasi kerja yang dibutuhkan.

Orang Melayu Riau, sebagai penduduk yang paling lama mendiami pulau-pulau di Selat Malaka yang secara geografi-budaya disebut sebagai Riau Kepulauan itu, tampaknya telah ditakdirkan menjadi saksi sejarah dari berbagai perubahan besar yang selalu melintas di wilayah mereka. Letaknya di Selat Malaka merupakan tempat lalu lalang kapal-kapal dari berbagai bangsa yang membawa kepentingan ekonomis maupun politisnya masing-masing. Dalam pertemuan (maupun pertentangan) berbagai kepentingan yang mengambil *setting* di Riau Kepulauan ini, yang tampaknya tetap adalah posisi kebanyakan penduduk selalu berada di pinggir sebagai penonton. Dalam masa Orde Baru sekarang ini, ketika secara lebih sistematis dipertemukan berbagai kepentingan politik dan ekonomi dengan nama segitiga

*Peneliti pada Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, LIPI. Makalah ini sebelum direvisi pernah dipresentasikan di seminar CIDES.

pertumbuhan SIJORI, "nasib sejarah" penduduk Riau Kepulauan kembali terulang.

Makalah ini ingin memperlihatkan sebuah sisi perubahan sosial yang sedang berlangsung di wilayah Riau Kepulauan, khususnya Batam dan Bintan, yaitu tersingkirnya penduduk setempat dalam persaingan meraih kesempatan kerja dengan para pendatang. Untuk memperoleh gambaran makro tentang dinamika demografis, khususnya tentang aspek tenaga kerja, akan dimanfaatkan data statistik yang tersedia. Keterbatasan data yang ada membuat sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang berbagai aspek penting, misalnya besarnya migrasi masuk ke daerah Riau Kepulauan, terutama ke Batam, yang merupakan fenomena paling mencolok di kawasan ini. Mengenai gambaran potensi tenaga kerja setempat, selain akan digunakan hasil Sensus 1990, akan dikemukakan beberapa temuan dari studi lapangan yang pernah dilakukan di Batam dan Bintan.

Dinamika Demografi-Ekonomi: Aspek Mobilitas Tenaga Kerja

Sebuah fenomena yang sangat mencolok yang terjadi di Propinsi Riau sejak dua dasawarsa terakhir adalah lonjakan pertumbuhan penduduk yang sangat cepat di Pulau Batam. Pada tahun 1971 Batam telah diputuskan sebagai basis logistik oleh Pertamina. Selanjutnya, pada tahun 1983 Batam diubah statusnya menjadi kota madya, sehingga sejak itu secara administratif berdiri sendiri terlepas secara administratif dari kabupaten Kepulauan Riau, yang beribukota di Tanjung Pinang dan terletak di Pulau Bintan.

Tak dapat disangkal bahwa dipilihnya Batam sebagai lokasi untuk berbagai aktivitas ekonomi, telah mengundang orang-orang untuk mengadu nasib di Pulau Batam.

Berbeda dengan Batam yang telah menjadi fokus investasi sejak awal tahun 1970-an, Bintan baru tahun 1990 secara resmi diputuskan menjadi bagian kerja sama SIJORI. Meskipun demikian, di Bintanlah secara historis terdapat pusat kegiatan ekonomi maupun budaya penduduk Riau Kepulauan. Jumlah penduduk Bintan juga telah mencapai lebih dari 150.000 pada tahun 1990. Pada saat ini Bintan sedang dikembangkan menjadi daerah industri, turisme dan proyek air minum untuk Singapura. Pada tahun 1991 rencana tata guna tanah untuk pengembangan Bintan telah selesai, di mana diperkirakan 65% atau 72.000 ha tanah di Bintan akan dipergunakan untuk menunjang rencana pengembangan tersebut. Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tahap pembangunan sarana dan prasarana diperkirakan akan mencapai 120.000 orang. Sesudah berbagai sarana tersedia, diperkirakan akan tersedia 60.000 kesempatan kerja tetap di Bintan (Ahmad, 1992: 427).

Sebagaimana terlihat dari Tabel 1, penduduk Batam telah tumbuh dari hanya sekitar 6.000 jiwa pada tahun 1973 menjadi lebih dari 115.000 jiwa pada pertengahan tahun 1992. Namun demikian, yang menarik adalah bahwa lonjakan pertumbuhan terjadi dengan sangat mencolok sesudah tahun 1988. Ini terutama berkaitan dengan perubahan kebijaksanaan strategi dan prioritas pembangunan yang terjadi di Batam dan sekitarnya. Dari awal tahun 1970-an sampai tahun 1988 pembangunan di Batam terutama berkaitan dengan berbagai usaha eksplorasi minyak oleh Pertamina. Sejak tahun 1989, dimulailah babak baru pembangunan

Tabel 1. Penduduk Propinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Riau, Kota Batam dan Pulau Bintan: 1970-1990-an.

Tahun	Prop. Riau	Kab. Kep. Riau	P. Bintan	Kodya Batam
1971	1.641.074	331.136		6.000
1980	2.163.896	442.712		38.663
1983				43.000
1988				79.400
1989				90.500
1990	3.278.807	458.199	153.387	105.820
1991				112.846
1992				115.198

Sumber: Data dihimpun dari berbagai publikasi antara lain *Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 1990, Kepulauan Riau dalam Angka 1990, Batam dalam Angka 1990/1991, Data Pengembangan Bareleng Sampai dengan Juni 1992*.

Batam dan secara resmi dimulai kerja sama segitiga pertumbuhan SIJORI antara Malaysia, Indonesia dan Singapura. Kerja sama SIJORI, sebagaimana telah banyak diulas (Pangestu, 1991; Ahmad 1992) didorong terutama oleh pihak Singapura, yang antara lain ingin melakukan pemindahan (relokasi) industrinya ke Batam. Sejak saat inilah dibuka investasi untuk berbagai jenis industri yang berorientasi ekspor, seperti industri elektronik dan kimia. Selain itu juga berkembang industri *real estate*, makanan dan turisme. Lonjakan jumlah penduduk Pulau Batam yang terjadi secara mencolok sejak tahun 1989, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kebijaksanaan investasi ini.

Perkembangan yang juga sangat menarik adalah berkaitan dengan semakin "urban"-nya Pulau Batam selama satu dekade terakhir. Seperti dapat dilihat dalam Tabel 2, berdasarkan definisi Biro Pusat Statistik tentang daerah perkotaan dan pedesaan, selama

sepuluh tahun (1980-1990) penduduk Pulau Batam yang tinggal di daerah yang berstatus pedesaan telah mengalami penurunan dari 30.743 jiwa menjadi 13.949 jiwa. Sebaliknya, pada kurun waktu yang sama, mereka yang tinggal di daerah yang berstatus perkotaan naik dengan sangat drastis dari 7.920 menjadi 91.871. Berkembangnya jumlah sarana dan prasarana yang cepat di Batam, adalah alasan kuat untuk memasukkan sebagian besar wilayahnya sebagai daerah perkotaan.

Melihat persyaratan jenis industri yang diizinkan beroperasi di Batam, strategi dan kebijaksanaan pengembangan Batam jelas belum mempertimbangkan aspek pengembangan sumber daya manusia setempat. Misalnya, jenis industri yang bersifat padat karya (*labour intensive*) yang memungkinkan penduduk setempat berpartisipasi, termasuk dalam *negative list* persyaratan investasi di Batam (Pangestu, 1991: 79).

Tabel 2

**BATAM: PERUBAHAN PENDUDUK PEDESAAN DAN PERKOTAAN
MENURUT KECAMATAN, 1980-1990**

Kecamatan	1980		1990	
	Kota	Desa	Kota	Desa
Belakang Padang	7.920	6.549	9.513	7.420
Batam Barat	-	6.557	21.301	-
Batam Timur	-	17.637	61.057	6.529
Total	7.920	30.743	91.871	13.949

Sumber: *Penduduk Kodya Batam Hasil Sensus Penduduk 1990*, hal. 7.

Tabel 3

**PERKEMBANGAN TENAGA KERJA LOKAL DAN ASING DI BATAM
1985-1990**

Tahun	Lokal	Pertumbuhan	Asing	Pertumbuhan
1985	6.159		230	
1988	9.478	15,45	153	-12,75
1989	11.041	34,27	140	28,08
1991	22.942		295	
1992	27.256	18,80	387	31,19

Sumber: *Data-data Pengembangan Barelang Sampai dengan Juni 1992*.

Apabila kita lihat perkembangan tenaga kerja di Batam, terlihat jelas bahwa pertumbuhannya memang sangat cepat. Dari Tabel 3, terlihat jumlah tenaga kerja lokal, dalam arti tenaga kerja Indonesia, meningkat dari 6.159 orang pada tahun 1985 menjadi 27.256 pada bulan Juni 1992. Sedangkan jumlah te-

naga kerja warga negara asing tidak banyak mengalami perkembangan yang berarti, dari 230 pada tahun 1985 menjadi 387 pada tahun 1992. Jumlah tenaga kerja asing ini bahkan tercatat pernah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 12,7% antara tahun 1985 dan 1988, dari 230 turun menjadi 153.

Dari data statistik pencari kerja yang terdaftar di Kantor Tenaga Kerja Kodya Batam pada tahun 1990, memang terlihat kecenderungan yang meningkat dari mereka yang mencari kerja di Batam. Dari Tabel 4 tampak bahwa jumlah pencari kerja wanita melonjak dengan tajam setelah tahun 1989, sementara di pihak lain pencari kerja laki-laki mengalami penurunan ini pada periode yang sama. Melonjaknya pencari kerja wanita berhubungan dengan mulai beroperasinya berbagai jenis industri yang khusus mempekerjakan tenaga kerja wanita, terutama industri elektronik.

Tabel 4

PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR DI
DEPNAKER KODYA BATAM TAHUN 1990

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total
1986	351	59	410
1987	299	70	369
1988	476	103	579
1989	1.067	430	1.497
1990	515	1.162	1.677

Sumber: *Batam dalam Angka 1990/1991*, hal. 44.

Meskipun belum pernah ada upaya untuk menghitung secara pasti, membandingkan angka statistik penduduk Batam dan jumlah tenaga kerja yang secara resmi tercatat, terdapat dugaan kuat bahwa tidak sedikit pekerja di Batam belum terdaftar secara resmi atau ilegal. Pekerja ilegal ini kemungkinan banyak dilakukan untuk jenis pekerjaan yang bersifat tidak tetap seperti buruh bangunan harian, pelacuran dan macam-

macam pekerjaan lain yang bersifat informal. Berkembangnya pemukiman tidak resmi di berbagai tempat di Batam juga merupakan indikasi banyaknya migran masuk yang tidak terkontrol perkembangannya.

Di Asia atau secara lebih sempit ASEAN, mobilitas tenaga kerja ke dan dari Indonesia dari sudut volumenya memang tidak merupakan sesuatu yang berarti dibandingkan dengan Filipina atau Thailand yang tenaga kerjanya telah banyak melakukan migrasi secara internasional (Gunasekaran dan Sullivan, 1990). Dalam hubungan dengan perkembangan segitiga pertumbuhan SIKORRI, yang menarik adalah justru meningkatnya tenaga kerja ilegal (pendatang haram) dari Indonesia ke Johor. Arus investasi dari Singapura pada sektor manufaktur di Johor telah mendorong terjadinya mobilitas tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan di Johor. Kekosongan tenaga kerja di daerah pedesaan, terutama yang semula bekerja di perkebunan kelapa sawit, telah membuka kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk masuk ke Johor dan menggantikan pekerja-pekerja Malaysia di perkebunan kelapa sawit yang telah berpindah ke sektor industri di perkotaan (Russel dan Teitelbaum, 1992).

Potensi Sumber Daya Manusia Setempat: Adakah Peluang untuk Bersaing?

Makalah ini sejak awal mengartikan penduduk setempat secara etnis sebagai orang Melayu Riau. Namun demikian, sangat disadari bahwa tidak mudah melakukan identifikasi siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan suku bangsa Melayu di sini. Hal ini disebabkan antara lain karena masyarakat Melayu Riau pun sudah merupakan campur-

an dari berbagai suku bangsa pendatang yang telah lama bermukim di Kepulauan Riau, seperti suku bangsa Bugis, Jawa atau Cina. Karena itu jika kita mengatakan penduduk setempat, maka terutama adalah bahwa mereka yang telah lama bermukim atau lahir di wilayah tersebut.

Dari hasil Sensus Penduduk tahun 1990, kita dapat melihat gambaran secara garis besar bagaimana keadaan sumber daya manusia di Propinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Riau dan Kota Madya Batam. Tabel 5 dan 6 merupakan gambaran umum keadaan pendidikan dan ketenagakerjaan, yang dianggap sebagai proyeksi keadaan sumber daya manusia di Propinsi Riau.

Tabel 5

PERSENTASE PENDUDUK UMUR 10 KEATAS
MENURUT PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN
TAHUN 1990

	Prop. Riau	Kab Kep Riau	Kodya Batam
Tidak Bersekolah	10,6	15,5	7,9
SD Tidak Tamat	36,8	39,1	24,2
Tamat SD	28,4	27,8	26,2
SMTp Umum	11	8,6	13,1
SMTp Kejuruan	1,3	1,1	0,8
SMTA Umum	6,2	2,9	14,5
SMTA Kejuruan	4,4	4,2	9,6
D I/II	0,3	0,2	0,8
Akademi (D III)	0,4	3	1,1
Universitas	0,6	0,2	1,2
TT			
Total	100,0	100,0	100,0
Jumlah	2.239.213	342.561	78.247

Sumber: *Penduduk Riau Hasil Sensus Penduduk 1990*, Seri S2.04, hal. 30.

Dari Tabel 5 misalnya, ternyata pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk yang telah berusia 10 tahun ke atas, memperlihatkan betapa masih rendahnya kualitas pendidikan yang dimiliki, untuk seluruh propinsi, 76% penduduknya hanya berpendidikan sampai tingkat SD. Di kabupaten Kepulauan Riau dan Kodya Batam berturut-turut persentase mereka yang hanya sampai pendidikan setingkat SD adalah 82% dan 58%. Kepulauan Riau juga tercatat sebagai kabupaten yang memiliki proporsi penduduk buta huruf yang tertinggi di Propinsi Riau (14,5%). Dibandingkan dengan angka propinsi maupun angka kabupaten Kepulauan Riau, Kota Madya Batam memiliki persentase yang cukup tinggi (24%) dari mereka yang memiliki pendidikan setingkat SMTA. Keadaan ini tidak terlalu mengherankan mengingat besarnya migran masuk yang memiliki tingkat pendidikan setingkat SMTA, datang dari berbagai tempat di luar Batam.

Jika sekarang kita lihat aspek ketenagakerjaan yang ada pada penduduk Riau, seperti terlihat dari Tabel 6, untuk keseluruhan Propinsi Riau maupun untuk kabupaten Kepulauan Riau, terlihat jelas bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor "tradisional" (sektor A) masih sangat besar. Batam, sebagaimana dapat diduga, telah memperlihatkan struktur ketenagakerjaan yang bersifat industrial, dengan besarnya proporsi penduduk yang terlibat di sektor "modern" (sektor B dan C).

Upaya untuk memperoleh informasi tentang keadaan sumber daya manusia secara lebih mendalam pernah dilakukan oleh Pusatlitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI pada tahun 1985. Sejumlah 300 kuesioner disebarkan kepada responden (98% laki-laki) yang berumur antara 20-60 tahun di be-

Tabel 6
**PERSENTASE PENDUDUK 10 KE ATAS YANG BEKERJA SEMINGGU YANG LALU
 MENURUT LAPANGAN USAHA UTAMA TAHUN 1990**

	Prop. Riau	Kab. Kep. Riau	Kodya Batam
Sektor A: Pertanian, Kehutanan, Perikanan dll.	58,1	46	16,6
Sektor B: Pertambangan, Industri, Listrik, Bangunan, dll.	13,1	18	37,3
Sektor C: Perdagangan, Angkutan, Keuangan, Jasa, dll.	27,8	34,3	45,3
Tak Terjawab	1	1,7	0,8
Total	100,0	100,0	100,0
Jumlah	1.209.160	161.780	43.132

Sumber: *Penduduk Riau Hasil Sensus Penduduk 1990*, Seri S2.04, hal. 210.

berapa lokasi di Batam. Mengenai tempat lahir diperoleh informasi sebagai berikut: 21,3% dilahirkan di Batam, diikuti oleh mereka yang lahir di Jawa 27,3%, Riau 17%, Sumatera Barat 11% dan Sumatera Utara 7%. Sedangkan sisanya dilahirkan dari berbagai tempat lainnya di Indonesia.

Pendidikan yang dimiliki oleh para responden ternyata cukup bervariasi sebagai berikut: Tidak pernah bersekolah hanya 1%, sedangkan mereka yang menamatkan SD 38%, SLTP 18%, SLTA 25%, sementara yang telah menyelesaikan pendidikan Akademi dan Universitas sebesar 3,5%. Gambaran mengenai status pekerjaan para responden adalah sebagai berikut: bekerja pada usaha swasta 32%, pemerintah 32%, bekerja sendiri tanpa buruh 23%, sebagai pengusaha dengan buruh 6,7%, sisanya sekitar 7% adalah pensiunan atau penganggur.

Salah satu kesimpulan dari studi ini adalah bahwa meskipun pengembangan industri belum dapat menyerap angkatan kerja yang ada, namun menurut para responden dinilai telah dapat memberikan tingkat kesejahteraan hidup yang baik kepada masyarakatnya (Tan, 1985: 37).

Pada pertengahan tahun 1992, tim peneliti Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI kembali melakukan penyebaran kuesioner, di samping melakukan wawancara mendalam dengan informan terpilih di kecamatan Batam Barat, Batam Timur, Bintan Utara dan Bintan Timur (Effendi, 1993). Bila pada penelitian tahun 1985 respondenya diambil secara *random* tanpa memperhatikan latar belakang etnis, kali ini hanya responden yang merupakan penduduk asli Melayu saja yang diwawancarai. Dari 250 responden umur antara 20-40 tahun, diper-

oleh berbagai informasi tentang karakteristik maupun persepsinya terhadap pembangunan yang terjadi di daerahnya. Pada penelitian ini jumlah responden diusahakan seimbang antara laki-laki dan wanita dengan asumsi bahwa melihat pasar kerja yang ada kebutuhan tenaga kerja wanita cukup terbuka.

Dilihat dari aspek pendidikan, diperoleh informasi bahwa pendidikan mereka mayoritas (81%) hanyalah setingkat SD. Profil pekerjaan mereka adalah sebagai berikut: nelayan 17%, buruh industri 23%, ibu rumah tangga 34%, petani kebun 6% (di Kecamatan Bintan Timur). Lebih dari 35% responden mengaku bekerja sebagai nelayan sebelum mendapatkan pekerjaannya yang sekarang. Mereka yang bekerja sebagai buruh industri menyatakan tidak bekerja berdasarkan jam kerja yang tetap. Khusus untuk responden dari Kecamatan Bintan Timur, mereka menempati lokasinya sekarang karena tempat pemukiman mereka semula, di daerah pantai, telah dijadikan proyek pembangunan untuk sarana dan prasarana industri pariwisata. Jika di tempat semula mereka bekerja sebagai nelayan, sekarang sebagian dari mereka terpaksa harus memulai pekerjaan sebagai petani kebun.

Sehubungan dengan terbukanya lapangan pekerjaan, baik di Batam maupun Bintan, para responden mengatakan bahwa menurut penilaian mereka mayoritas yang memperoleh pekerjaan adalah para pendatang dan bukan penduduk setempat. Mereka juga mengetahui bahwa yang memiliki proyek-proyek di daerah tersebut adalah bukan penduduk setempat. Namun demikian, ketika ditanyakan apakah pembangunan yang sedang berlangsung memberikan manfaat bagi penduduk setempat, sebagian mengatakan bermanfaat, tetapi dari sudut ke-

rusakan lingkungan dan ganti rugi tanah dikatakan merugikan penduduk setempat. Ketika kepada mereka yang telah bekerja ditanyakan mengenai bagaimana caranya memperoleh pekerjaan yang dimiliki sekarang, umumnya mengatakan mendapatkannya dengan bantuan teman atau saudara yang tinggal di Batam atau Bintan. Hanya sebagian kecil yang mengatakan memperoleh pekerjaan melalui pemerintah.

Catatan Penutup: Perlunya Alternatif untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Setempat

Kalaulah dari berbagai indikator makro-ekonomi, Indonesia telah memperoleh berbagai keuntungan dari Segitiga Pertumbuhan SIJORI, dalam perspektif penduduk setempat yaitu orang Melayu Riau, berbagai indikasi yang ada justru memperlihatkan proses peminggiran kedudukan mereka selaku warga masyarakat yang telah lama menempati wilayah itu. Salah satu aspek yang ikut berperan dalam proses peminggiran ini, sebagaimana telah diungkapkan di atas, terutama karena kebijaksanaan investasi dan prioritas industri yang ada sama sekali tidak mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh mayoritas penduduk Riau Kepulauan.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada jelas tidak memungkinkan penduduk setempat bersaing dengan para pendatang dari luar daerah Riau Kepulauan. Persoalan bagi penduduk setempat, kalau toh mereka memiliki kualitas untuk memasuki pasaran kerja yang ada, adalah proses *recruitment* tenaga kerja yang dilakukan justru berlangsung di berbagai tempat di

luar daerah Riau Kepulauan, terutama di Jawa (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan Bandung) dan Sumatera (Pekanbaru, Medan dan Palembang). Dapat dikatakan bahwa *recruitment* tenaga kerja di luar sektor pemerintahan, umumnya tidak melalui Kanwil Depnaker setempat dan tidak pula langsung ke perusahaan yang bersangkutan. Kecuali buruh bangunan, tenaga kerja yang ada di berbagai perusahaan di Batam dipasok oleh tiga perusahaan pemasok tenaga kerja, yaitu PT. Tunas Karya Indonesia (Jakarta), PT. Kabila Mandiri Persada (Jakarta) dan PT. Wensindo (Singapura) (Effendi, 1993).

Sesudah Batam, saat ini Bintan mulai digarap untuk dikembangkan menjadi lokasi industri dan pariwisata. Berbeda dengan Batam yang ketika mulai dibangun (awal tahun 1970-an) dihuni hanya oleh sekitar 6.000 jiwa, Bintan pada awal pembangunannya (awal 1990-an) telah dihuni lebih dari 150.000 jiwa penduduk, jika proses *recruitment* tenaga kerja mengambil pola seperti yang sekarang terjadi di Batam, maka bisa

diduga bahwa reaksi yang akan terjadi dari penduduk setempat kemungkinan lebih memiliki implikasi sosial-politik yang besar.

Pengembangan sumber daya manusia setempat sudah semestinya menjadi keharusan dalam strategi pembangunan regional maupun secara khusus dalam paket kebijaksanaan investasi di daerah mana pun di Indonesia. Penyingkiran atau peminggiran penduduk setempat dari berbagai peluang untuk ikut berpartisipasi dan menikmati hasil pertumbuhan ekonomi tidak hanya sangat bertentangan dengan makna pembangunan, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang dianut konstitusi dan tujuan kita bernegara. Dari kaca mata yang lebih sempit, tidak adanya alternatif ini, di samping mempertinggi *economic cost* karena tenaga kerja harus didatangkan dari tempat yang jauh, yang justru krusial adalah membengkaknya keresahan di kalangan penduduk setempat akan memiliki implikasi sosial-politik yang dapat mempertinggi nilai *political risk* sebuah wilayah di mata para investor.

KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Mubariq. 1992. "Economic Cooperation in SIJORI Growth Triangle: An Indonesian Perspective" dalam *Ekonomi dan Keuangan Indonesia XL*, no. 4, 413-442.
- Effendy, Bisri. 1993. *Tradisi dan Potensi Sosial Ekonomi Masyarakat Riau Kepulauan* (Draft Laporan Penelitian). Jakarta: Puslitbang Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI.
- Gunasekaran, S. dan Gerard Sullivan. 1990. *Cross-Border Labour Flows in Southeast Asia: Patterns and Prospects*; Singapore: Southeast Asia Affairs 1990, ISEAS.
- Russel, S.S. dan Michael S. Teitelbaum. 1992. *International Migration and International Trade*. Washington, D.C.: World Bank Discussion Paper no. 160.
- Tan, Mely G. 1986. *Aspek Sosial Budaya Pengembangan Pulau Batam*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Pangestu, Mari. 1991. "An Indonesian Perspective", in Lee Tsao Yuan (ed.) *Growth Triangle: The Johor Singapore-Riau Experience*, 75-116. Singapore: ISEAS and IPS.